

STUDI DIMENSI *SYSTEMNESS* DAN *REIFICATION* DALAM PELEMBAGAAN PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) KABUPATEN TASIKMALAYA PASCA REFORMASI

Subhan Agung
Rino Sundawa Putra

Universitas Siliwangi, Jl. Siliwangi No. 24 Tasikmalaya 45116
subhanagung@unsil.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana institusionalisasi kepartaian yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Tasikmalaya pasca Reformasi. Penelitian ini dasari dari realitas politik di mana terdapat dominasi yang signifikan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) baik dalam eksekutif maupun legislatif dalam politik lokal di Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini akan berusaha mengungkap upaya institusionalisasi tersebut lewat kajian penelitian secara kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini di cover dengan pendekatan ilmu politik institusionalisme.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi *systemness* PPP cukup mapan dengan menjadikan peraturan-peraturan internal partai sebagai pedoman dalam menyelesaikan berbagai problem internal kepartaian. Selama ini PPP cukup berhasil membentuk dan menginternalisasi aturan-aturan tersebut dalam tingkah laku dan sikap kepartaian. Fungsi-fungsi kepartaian relatif berjalan walaupun belum cukup ideal. Sedangkan tentang Reifikasi kepartaian PPP menggunakan strategi pencitraan lewat pesantren, identifikasi partainya Nahdiyyin, pencitraan lewat lembaga politik dan mencitrakan diri sebagai partainya para ulama. Kedua dimensi tersebut secara akseleratif melahirkan PPP sebagai penguasa politik lokal di Kabupaten Tasikmalaya.

Kata Kunci : Systemness dan Reification, Institusionalisme

Abstract

This study aims to determine how the institutionalization of the party that carried out by Partai Persatuan Pembangunan (PPP) post-Reformation in Tasikmalaya District. This study of the underlying political reality in which there is a significant dominance of Partai Persatuan Pembangunan (PPP), both in the executive and legislative branches in local politics in Tasikmalaya district. This study will attempt to uncover the institutionalization efforts through a descriptive qualitative research studies.

The results showed that the dimensions of well-established PPP systemness by making internal party rules as guidance in resolving the internal problems of the party. During PPP quite successfully establish and internalize these rules in behavior party. Functions relatively walking party, although not quite ideal. As for the PPP party Reification using imaging strategies through boarding, as Nahdiyyin party identification, imaging through political institutions and portray themselves as the party of the scholars. The second dimension is accelerating childbirth PPP as the local political authorities in Tasikmalaya district.

Keyword : Systemness and Reification, Intituisoalisme

Penelitian ini akan mengkaji tentang proses pelebagaan (institusionalisasi) kepartaian pada salah satu partai Islam di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah *concern* terhadap dimensi *systemness* dan citra publik (*reification*) dalam

model institusionalisasi kepartaian Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Tasikmalaya pasca Reformasi.

Kajian ini diambil berdasarkan pada fenomena dan realitas politik bahwa Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya khususnya Pasca Reformasi sampai saat ini telah berhasil mewujudkan tatanan kepartaian sebagai partai penguasa. Dominasi Partai Persatuan Pembangunan - selanjutnya disingkat PPP tidak hanya menguasai kursi legislatif di Kabupaten Tasikmalaya, namun juga kursi eksekutif. Penguasaan tersebut tentunya berbanding terbalik dengan dinamika yang terjadi secara nasional, dimana PPP menjadi partai menengah yang dominasinya tidak terlalu “mentereng” dalam perpolitikan secara umum.

Dominasi PPP dalam eksekutif terbukti dengan memenangkan Pemilihan Bupati lewat mekanisme dipilih DPRD yang saat itu memenangkan Tatang Farhanul Hakim di tahun 2001, kemenangan tersebut terulang dalam Pemilu langsung tahun 2006 yang memenangkan *incumbent*, sampai yang terakhir adalah kemenangan UU Ruzhanul Ulum dalam Pemilu langsung tahun 2011. Selain dominasi dalam eksekutif juga PPP mendominasi peraih kursi DPRD secara konsisten sejak Pasca Reformasi sampai sekarang. Pada Pemilu langsung 2004 PPP Kabupaten Tasikmalaya meraih kursi sebanyak 11, tahun 2009 mendapat 14 kursi Parlemen dan tahun 2014 mendapat 9 kursi. Perolehan tersebut merupakan suara tertinggi

menyisihkan partai dominan lainnya yakni PKB 8 Kursi, PDI-P 8 Kursi dan Golkar 7 Kursi.

Melihat data di atas, tidak diragukan lagi PPP Kabupaten Tasikmalaya merupakan partai penguasa yang sangat mendominasi dalam perpolitikan lokal Tasikmalaya. Hal ini tentunya tidak terjadi begitu saja, namun ada banyak hal yang mempengaruhi keberhasilan PPP dalam mengontrol politik lokal di Tasikmalaya. Hal tersebut bisa saja dipengaruhi oleh sosio-kultural masyarakat, historisitas kepartaian, institusionalisasi yang dibangun dan banyak lagi.

Dari fenomena dan fakta politik di atas, kajian ini akan mengkhususkan kajian pada faktor institusionalisasi kepartaian yang sengaja dibangun oleh PPP Kabupaten Tasikmalaya dalam mempertahankan dominasi yang selama ini dicapai. Pertimbangan kajian ini diambil dengan dasar bahwa tidak mungkin PPP dapat eksis sejauh ini bahkan menjadi partai penguasa jika tidak melakukan institusionalisasi kepartaian yang memadai.

Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah dimensi *systemness* dan dimensi *reification* dalam pelebagaan kepartaian yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Tasikmalaya sehingga mampu mempertahankan dominasinya dalam perpolitikan lokal di Kabupaten Tasikmalaya ?.

Teori Institusionalisasi Kepartaian

Kajian teoritis yang akan digunakan

dalam menggambarkan *reification* partai Golkar ini adalah bersumber dari kajiannya Randall dan Svasand¹. Dua pemikir ini sebelumnya melihat dari kajian-kajian institusionalisasi kepartaian Selznick (1957) Huntington (1968), Kenneth Janda (1980), Panebianco (1988) dan terbaru Levitsky (1998). Keduanya menggunakan istilah-istilah yang oleh ilmuwan-ilmuwan di atas pernah dipakai dalam bentuk kajian metriks yang unik.

Model ini mereka gunakan untuk mengkaji institusionalisasi kepartaian di Dunia Ketiga seperti misalnya Argentina, Malaysia termasuk Indonesia. Model metriks Randall dan Svasand ini juga digunakan Akbar Tandjung (2007)² sebagai kerangka teoritik dalam membaca institusionalisasi Partai Golkar pasca jatuhnya Soeharto dan juga yang terbaru dipakai oleh Tomsa yang juga sama untuk membaca institusionalisasi Partai Golkar Pasca Soeharto (2008)³.

Dimensi-Dimensi Institusionalisasi Partai

Pelembagaan partai politik dalam Randall dan Svasand⁴ adalah proses pe-mantapan partai politik baik secara struktural dalam rangka mempolakan perilaku

maupun secara kultural dalam mempolakan sikap dan budaya (*the process by wich the party becomes established in terms of both integrated patterns on behavior and of attitudes and culture*). Proses pelembagaan ini mengandung dua aspek, yaitu aspek internal-eksternal dan aspek struktural-kultural. Bila kedua dimensi ini dipersilangkan, maka akan tampak sebuah tabel empat sel, yaitu; *pertama*, dimensi kesisteman (*systemness*) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan struktural. *Kedua*, dimensi identitas nilai (*value infusion*) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan kultural. *Ketiga*, dimensi otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan (*decisional autonomy*) sebagai hasil persilangan aspek eksternal-struktural. *Keempat*, dimensi pengetahuan atau citra publik (*reification*) terhadap suatu partai politik sebagai persilangan aspek eksternal-kultural.

Dimensi	Internal	Eksternal
Struktural	Kesisteman	Otonomi
Kultural	Identitas Nilai	Citra pada Publik

Sumber : Randall-Svasand (2002 :13).

Gambar 1. Metriks Dimensi-Dimensi Institusionalisasi Kepartaian

Pertama, dimensi kesisteman adalah proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, termasuk penyelesaian konflik, dilakukan menurut aturan, persyaratan, prosedur dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan dalam AD/ART partai politik.

¹ Vicky Randall dan Lars Svasand (2002), *Party Institutionalization in New Democracies, Party Politics*, Vol.8 No.1, Sage Publication, London, hal 5-29, atau didownload di <http://ppq.sagepub.com>.

² Lihat dalam Akbar Tandjung, 2007, *The Golkar Way : Survival Partai Golkar dalam Turbulensi Politik Era Transisi*, Gramedia, Jakarta.

³ Lihat dalam Dirk Tomsa (2008), *Party Politics and Democratization in Indonesia : Golkar in The Post- Soeharto Era*, Routledge, London and Newyork.

⁴ Ibid, hal.11

Kedua, dimensi identitas nilai ini berkaitan dengan identitas partai politik berdasarkan ideologi atau *platform* partai dan karena itu berdasarkan basis sosial pendukungnya dan identifikasi anggota terhadap pola dan arah perjuangan yang diperjuangkan partai politik tersebut. *Ketiga*, dimensi otonomi suatu partai politik dalam pembuatan keputusan berkaitan dengan hubungan partai dengan aktor luar partai, baik dengan sumber otoritas tertentu (penguasa, pemerintah), maupun dengan sumber dana (pengusaha, penguasa, negara atau lembaga luar) dan sumber dukungan massa (organisasi masyarakat). *Keempat*, dimensi pengetahuan publik tentang partai politik, merujuk pada pertanyaan apakah keberadaan partai politik tersebut telah tertanam pada imajinasi publik dan bagaimana pihak lain menyesuaikan dengan visi-misinya⁵.

Dari tulisan di atas, terpetakanlah dalam ranah mana penulis memfokuskan kajian, yakni memfokuskan pada salah satu dimensi pelembagaan partai politik yaitu pembangunan citra partai politik (*reification*). Hal inilah yang akan dikaji kemudian dalam konteks Partai Golkar masa kepemimpinan Akbar Tandjung. Kajian dimensi yang lain jika ada hanya sebagai pelengkap argumen, jika hal tersebut berkaitan dengan citra partai ke publik. Hal ini dimungkinkan terjadi, karena pada dasarnya metrik Randall dan Svasand ini *include* antara satu dimensi dengan dimensi lainnya.

Dimensi Systemness Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya

Mengkaji apa yang dikemukakan oleh Randall dan Svasand (2002) sebagaimana telah di *review* dalam tinjauan pustaka, bahwa pelembagaan partai politik adalah proses pemantapan baik secara struktural dalam rangka mempolakan perilaku maupun secara kultural dalam mempolakan sikap dan budaya, maka dalam hal peneliti menemukan bahwa dominasi PPP di Kabupaten Tasikmalaya tidak bisa dilepaskan dari warisan eksistensi PPP pada saat Rezim Orde Baru. Artinya secara struktural PPP di Kabupaten Tasikmalaya memang sudah mapan, baik secara keorganisasian yang melingkupi kepengurusan hingga tingkat ranting maupun keamanan dalam fungsi-fungsi partai politik, yakni komunikasi politik, pendidikan politik dan rekrutmen politik, hanya saja karena rezim Orde Baru yang menggunakan pendekatan otoriterianisme, penggunaan intimidasi, manipulasi dan politisasi birokrasi maka suara ataupun kekuatan PPP di Kabupaten Tasikmalaya tidak bisa mengimbangi kekuatan Golkar pada waktu itu, tetapi secara struktural PPP di Kabupaten Tasikmalaya telah siap tempur manakala reformasi yang menjatuhkan kekuasaan Soeharto terjadi⁶.

Karena kesiapan struktural tersebut ketika Reformasi bergulir, Soeharto lengser dan tuntutan demokratisasi, kebebasan dan tuntutan-tuntutan terhadap hak-hak politik

⁵ Ibid, hal. 10-11

⁶ Hasil wawancara dengan Asop Sopiudin, anggota Fraksi PPP Kabupaten Tasikmalaya

menjadi isu yang menggerakkan kekuatan massa, maka PPP di Kabupaten Tasikmalaya tampil sebagai partai yang banyak merebut simpati masyarakat Tasikmalaya. PPP berhasil meraih simpati masyarakat dengan menggambarkan dirinya sebagai partai yang “terdzholimi” oleh penguasa Orde Baru. Isu “terdzholimi” ini yang dibungkus dengan wacana-wacana, gagasan-gagasan dan isu-isu ke-Islaman menjadikan PPP di Kabupaten Tasikmalaya menjadi partai dominan pasca Reformasi.

Kemapanan secara struktural tersebut kemudian didukung oleh faktor kultural yang menempatkan PPP sebagai partai dominan di Kabupaten Tasikmalaya. Secara sosiologis, Tasikmalaya memiliki identitas ke-Islaman yang sangat kental, memiliki basis pesantren yang tersebar hampir di setiap kecamatan yang kemudian melahirkan ulama-ulama kharismatik yang disegani sekaligus sangat dipatuhi, dan banyak ulama kemudian menjadi aktivis Partai, atau eksistensinya mewakili kepentingan PPP. Keterkaitan antara faktor sosiologis akan identitas Tasikmalaya sebagai kota penuh nuansa ke-Islaman dengan berdirinya PPP sebagai partai “hijau”, memiliki simbol ke-Islaman, *platform*, visi-misi tujuan-tujuan ke-Islaman membuat PPP diyakini sebagai partai yang mewakili suara umat Islam. Jadi antara faktor struktural dan kultural akan dominasi PPP di Kabupaten Tasikmalaya tidak terlepas dari dua pertautan tersebut, antara faktor struktural dan faktor kultural sama-sama saling mengisi, mempengaruhi satu sama lain, dan tidak bisa dikatakan

mana yang lahir duluan.

Dari dua elemen yang saling mengisi tersebut, maka setelah Reformasi PPP di Kabupaten Tasikmalaya mampu mendominasi dengan dua kali berturut-turut mengisi jabatan Bupati dan menjadi fraksi mayoritas di DPRD. Walaupun setelah Reformasi banyak partai Islam bermunculan, yang sama-sama memiliki konsep perjuangan ke-Islaman bahkan suara Nahdhatul Ulama (NU) yang menjadi organisasi Islam *mainstream* di Kabupaten Tasikmalaya terpecah, karena pada waktu itu lahir Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai representasi suara kalangan Nahdhiyin (warga NU), tetapi PPP di Kabupaten Tasikmalaya tetap menjadi partai dominan. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa secara struktural PPP telah siap dalam menyikapi perubahan sosial, yakni tuntutan Reformasi yang kemudian didukung oleh faktor kultural. Bahkan Asop Sopiudin⁷ mengatakan kultur-lah yang membesarkan PPP di Kabupaten Tasikmalaya.

Secara struktural adanya relasi dengan pesantren dan sosok Ulama itu sendiri membuat PPP di Kabupaten Tasikmalaya memiliki ruang-ruang pengkaderan “warisan” yang secara turun-temurun menjadi basis suara PPP. Adalah pesantren Miftahul Huda yang dulu didirikan oleh Almarhum KH. Khoer Affandi, sosok ulama yang vokal terhadap pemerintah Orde Baru yang kemudian berdiri secara struktural dalam kepengurusan PPP. Beberapa kali pernah

⁷ Anggota Fraksi PPP DPRD Kabupaten Tasikmalaya periode 1999-2004, 2004-2009, 2014-2019

berurusan dengan aparat karena kritis dan berada pada garda terdepan eksistensi PPP di Kabupaten Tasikmalaya. Setelah Orde Baru tumbang dan Ua Ajengan, sebutan bagi KH. Khoer Affandi wafat, amanat Ua Ajengan untuk terus meneruskan “perjuangan” dalam bentuk dukungan dan militansi kepada partai terus dipelihara, sehingga memunculkan mitos yang secara kultural menjadi sarana “rekrutmen” simpatisan fanatik, yakni adanya ungkapan “kualat” bila tidak mematuhi amanat Ua Ajengan.

Bisa dibayangkan berapa ribu santri dari berbagai angkatan yang tidak sedikit kemudian antara santriwan dan santriwati dijodohkan (*ta'aruf*) kemudian menikah, melahirkan keturunan dari “doktrin” dan ideologi politik yang sama dengan mitologi “kualat”. Maka dalam hal ini Himpunan Alumni Miftahul Huda (Hamida) bisa dikatakan sebagai organisasi yang mendulang suara untuk PPP, dan salah satu penyumbang suara terbesar yang mengantarkan H. Uu Ruzhanul Ulum menjadi Bupati sebagai bagian dari keluarga pesantren Miftahul Huda adalah dukungan Hamida.

Dalam konteks kesisteman juga PPP Kabupaten Tasikmalaya sudah mapan dan dewasa dalam menyikapi berbagai hal, khususnya terkait internal. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) menjadi pegangan utama dalam memecahkan semua persoalan tersebut. Kader-kader PPP sangat sadar dan memahami setiap tindakan yang sesuai dan tidak sesuai dengan AD ART tersebut. Sebagai contoh hal tersebut adalah ketika mundurnya Tatang Farha-

nul Hakim dari PPP dan kemudian pindah ke Partai Amanat Nasional. Bagi PPP hal tersebut tidak menimbulkan gejolak berarti, walaupun tokoh ini sebenarnya tokoh penting dalam perkembangan PPP khususnya pasca Reformasi. Hal ini terjadi karena sebagian besar kader dan elit telah memahami, bahwa menjadi anggota dari Parpol dan tidak adalah hak setiap warga Negara, hal tersebut pilihan semata, dan keluarnya Tatang dianggap tidak menyalahi AD/ART. Hal tersebut dianggap sebagai dinamika Parpol semata. Bahkan sampai saat ini Tatan masih dianggap sesepuh bagi PPP, walaupun tokoh ini saat ini menjadi elit di partai kompetitornya, yakni Partai Amanat Nasional (PAN). Hal tersebut juga tidak menimbulkan ekses konflik dan perpecahan di kalangan kader dan pendukung Tatang Farhanul Hakim. Hal ini tentunya berbeda dengan yang terjadi di tingkat nasional. Di mana AD ART ternyata menimbulkan dua penafsiran yang menyebabkan dua kubu sampai saat ini, yakni Kubu Suryadharma dan Romahurmuziy.

Bila menggunakan Metriks dimensi-dimensi institusionalisasi kepartaian dari Randall dan Svasand, maka akan tergambar dimensi institusionalisasi PPP di Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut :

Struktural	Internal Kesisteman : Mapan secara Organisasi dan fungsi-fungsi Partai Politik pra dan pasca reformasi, AD ART dipegang teguh sebagai pegangan dalam memecahkan masalah keorganisasian	Eksternal Otonomi : Relasi dengan pesantren dan Ulama dalam membentuk fanatisme pendukungnya
Kultural	Identitas Nilai : Ke-Islaman	Citra Publik : kepercayaan besar terhadap wacana-wacana ke-Islaman dan politik simbol ke-Islaman yang diusung PPP

Gambar 3. Metriks Systemness dan Reifikasi PPP Kabupaten Tasikmalaya
(diadopsi dari Randall dan Svasand, 2002).

Dimensi Reification Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya

Upaya perbaikan citra (*reification*) yang pertama kali dilakukan pasca Reformasi adalah berusaha mengubah *image* publik bahwa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah partai pelengkap (*gurem*) di masa Orde Baru. Menurut informan (Ruhimat, Ketua PPP Kabupaten Tasikmalaya saat ini), para elit PPP saat itu berusaha mengubah *image* tersebut. Walaupun Tasikmalaya memiliki sosio-kultural Kota Santri dan dikenal sebagai basis PPP, namun jika dibandingkan Golkar, PPP di masa Orde Baru tetap sebagai partai *Gurem*. Partai ini hanya unggul di pedesaan-pedesaan Tasikmalaya. Upaya perubahan *image* tersebut bukanlah tanpa maksud tertentu untuk hal-hal yang lebih strategis ke depannya terkait dengan popularitas dalam memenangkan Pemilu dan menguasai pemerintahan, yang sebelumnya terus-menerus dikuasai oleh Golkar dan militer.

Konstelasi politik pasca jatuhnya Orde Baru sangat mendukung bagi PPP dalam merubah *image* tersebut di atas. Pal-

ing tidak ada beberapa hal yang dilakukan untuk merubah citra partai “*gurem*” di masa Orde Baru, khusus konteks di Tasikmalaya sebagaimana diinformasikan oleh informan UU Ruzhanul Ulum (Mantan ketua PPP, Bupati Tasikmalaya sekarang). *Pertama*, PPP saat itu berupaya mencitrakan sebagai partainya “orang-orang Nahdatul ‘Ulama (NU). Upaya ini didasari bahwa Tasikmalaya merupakan wilayah di Jawa Barat yang sebagian besar masyarakatnya pengikut Organisasi Nahdatul Ulama. Oleh karena itu, upaya pencitraan dengan melekatkan *image* PPP sebagai partainya Orang NU dianggap sebagai langkah tepat untuk meraih simpati masyarakat dalam memenangkan kontestasi melalui Pemilu Legislatif tahun 1999. Hal ini terbukti dengan kemenangan PPP sebagai partai yang mampu menempatkan wakilnya terbanyak di legislatif dan menempatkan elit partainya saat itu, yakni Tatang Farhanul Hakim sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya periode 1999-2004. Sedangkan untuk pe-

mimpin eksekutif, Bupati masih dipegang oleh Golkar dengan latar belakang militer yakni H. Sulyana WH yang memimpin Tasikmalaya sejak 1996-2001. Namun pada pemilihan 5 tahun berikutnya yakni tahun 2001 Tatang Farhanul Hakim justru mampu menyisihkan H.Sulyana Wirahadi Subarata sebagai Bupati Tasikmalaya periode 2001-2006 lewat pemilihan oleh Anggota DPRD, sehingga jabatan Ketua DPRD ditinggalkannya. Tatang Farhanul Hakim kemudian terpilih kembali lewat Pemilihan Kepala Daerah Langsung yang pertama kali oleh rakyat sebagai Bupati Kabupaten Tasikmalaya periode 2006-2011 (Kota Tasikmalaya telah menjadi Daerah Otonom Baru). Pusat pemerintahan kemudian dipindahkannya ke Singaparna, kawasan Gunung Koneng Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam konteks ini perlu dipahami bahwa kita semua mengetahui PPP sesungguhnya bukanlah partai milik Nahdlatul Ulama (NU) saja, bahkan di masa-masa awal pergerakan Indonesia tokoh-tokoh yang membidani PPP merupakan tokoh-tokoh yang dulunya menghidupkan Masyumi. Tetapi pencitraan yang dilakukan di Tasikmalaya, khususnya pasca Reformasi (di masa Tatang Farhanul Hakim berkuasa) dengan mendekati NU sangatlah efektif dan hal tersebut berhasil menjadikan PPP “seolah-olah” partainya Orang NU di masa itu.

Tatang Farhanul Hakim merupakan tokoh sentral di masa periode ini, sebagai ketua PPP Kabupaten Tasikmalaya, dan juga sebagai Bupati beliau dianggap me-

iliki karakter kepemimpinan yang kuat dalam menguasai Birokrasi Pemerintahan dan menginternalisasi nilai-nilai PPP ke semua stafnya. Di masanya ini PPP mewujudkan menjadi partai penguasa. Partai yang disegani peraih kursi terbanyak di parlemen Kabupaten di pemilu 2004 yakni 12 kursi. Beliau juga merupakan salah seorang tokoh sentral dari organisasi Nahdlatul Ulama, sehingga tidak heran jika konstituen PPP banyak tersebar di kalangan Nahdlatul Ulama. Walaupun ada PKB pasca Reformasi, tidak dengan serta merta PPP ditinggalkan oleh pengikut NU. Bahkan dapat dikatakan sebagian besar warga Naddiyin menjadi konstituen PPP. Sehingga pantaslah jika PPP menjadi pemenang dalam Pemilu Legislatif tahun 2004, pemenang Pilkada Tahun 2001, dan Pemenang Pemilukada Tahun 2006.

Kedua, upaya membangun citra positif Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga dilakukan melalui pendekatan kalangan elit politik PPP melalui pesantren. Elit-elit PPP generasi awal Reformasi seperti Tatang Farhanul Hakim, UU Ruzhanul ‘Ulum, H. Ruhimat dan lainnya merupakan tokoh-tokoh yang lekat dengan pesantren. Tatang dikenal sebagai orang pesantren yang kemudian menjadi politisi PPP. Keluarga besarnya merupakan tokoh dan pendiri di beberapa pesantren besar di Tasikmalaya, seperti Sukahideng dan Cipasung. Sedangkan UU Ruzhanul ‘ulum merupakan salah satu pimpinan Pondok Pesantren terbesar di Tasikmalaya, yakni Pondok Pesantren Miftahul Huda, Manonjaya. Beliau merupakan

cucu pendiri pesantren tersebut (KH. Khoer Affandi). Dalam peta politik di Kabupaten Tasikmalaya, bahkan di Tasikmalaya secara umum banyak dikuasai oleh 4 pesantren besar tersebut, yakni Miftahul Huda, Cipasung dan Sukahideng-Sukamanah Tasikmalaya.

Pendekatan-pendekatan tersebut jelaslah sangat efektif, karena para santri dan keluarganya tentunya memiliki simpati dan bahkan dalam banyak hal menjadi konstituen dari PPP itu sendiri. Sebagai pengajar dan pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) tokoh-tokoh tersebut dapat dengan mudah memberikan himbauan dan ajakan untuk bergabung dengan PPP yang mereka pimpin. Jumlah santri ribuan cukup efektif untuk mensosialisasikan PPP ke masyarakat. Apalagi pesantren-pesantren besar tersebut memiliki ikatan alumni yang fanatik dan solid yang dapat dijadikan agen untuk mensosialisasikan PPP, seperti Hamida untuk Alumni Ponpes Miftahul Huda.

Reifikasi yang dilakukan oleh petinggi-petinggi Partai Persatuan Pembangunan tersebut pada gilirannya mampu memenangkan Pemilu Legislatif tahun 2009 mempertahankan prestasi Pemilu Legislatif Tahun 2004 dengan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 12 kursi (24 persen kursi parlemen). Citra sebagai partainya kalangan pesantren juga didengung-dengungkan UU Ruzhanul Ulum ketika berkampanye untuk menuju Z 1 (calon Bupati bersama pasangannya, Ade Sugianto) di tahun 2011. Ade Sugianto merupakan ketua PDI P Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan

keturunan pesantren. Keduanya kemudian mampu memenangkan kontestasi akbar tersebut dan Koalisi PPP-PDI P tersebut mengantarkan UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya periode 2011-2016 menggantikan pendahulunya Tatang Farhanul Hakim dan H.E. Hidayat.

Kondisi politik terkini muncul konflik elit di PPP tingkat pusat dan melahirkan dua kubu kepemimpinan nasional. Sebagai PPP yang secara AD ART menginduk kepada PPP pusat, maka mereka menganggap secara formal tidak menginduk ke kubu manapun. Namun menginduk kepada kubu PPP yang sah secara konstitusional. PPP Kabupaten Tasikmalaya menganggap hal tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan bagi kesolidan PPP di daerah. Namun mereka juga berharap segera bersatu kembali dan ada solusi terbaik bagi kepengurusan PPP di tingkat bawah.

Citra publik merupakan situasi yang mampu mengangkat nilai kesetiaan konstituen dalam memberikan dukungannya, disamping itu untuk menguji derajat pengetahuan publik baik yang akan mempengaruhi aspirasi, sikap, perilaku bahkan imajinasi publik terhadap partai politik (Randall dan Svasand, 2002). Dalam pendekatan *systemness* untuk menjawab pertanyaan mengenai eksistensi PPP di Kabupaten Tasikmalaya, seperti yang telah dijelaskan bahwa pertautan antara kemapanan sistem, baik secara organisasi maupun fungsi-fungsi partai politik pra dan pasca Reformasi, juga faktor struktural mengenai sosio-kultur yang

mempengaruhi sosio-politik, di mana identitas dan nuansa ke-Islaman yang kental, sehingga mempengaruhi cara berpikir dan orientasi politik masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, maka dalam mencari derajat citra publik ini penulis menemukan pengaruh secara kultural juga merupakan faktor yang signifikan dalam menentukan besarnya citra publik PPP di Kabupaten Tasikmalaya yang akan menentukan derajat pengetahuan publik bahkan imaji publik terhadap PPP di Kabupaten Tasikmalaya.

Faktor kultural tersebut menjadi pembentuk dan kemudian memapankan ideologi partai ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Citra yang terbentuk saling berkelindan antara ke-Islaman dalam dimensi pendidikan (pesantren), ke-Islaman dalam dimensi kultur yakni salah satunya dengan mendekati salah satu Ormas terbesar di Indonesia dan juga di Tasikmalaya yakni Nadhatul Ulama, cara berpikir, termasuk eksistensi ke-kharismaan sosok ulama yang ditaati, dan kemudian mempengaruhi dalam ke-Islaman dalam dimensi politik, yang menentukan orientasi politik masyarakat Tasikmalaya yang pada akhirnya merancang bangun ideologi politik, baik yang melekat dalam individu dan kemudian menjadi kolektif.

Hal tersebut di ataslah relasi-relasi yang terbentuk mengenai citra publik terhadap eksistensi PPP di Kabupaten Tasikmalaya. Artinya ketika berbicara citra PPP, maka sekaligus berbicara tentang konsepsi ke-Islaman, nilai-nilai religiusitas dan harapan mengenai implementasi nilai-nilai

ke-Islaman, baik secara sosiologis maupun politis bahkan formalistis dalam wujud kebijakan pemerintah daerah.

Isu-isu, wacana-wacana atau gagasan-gagasan bahkan simbol-simbol politik ke-Islaman merupakan fondasi yang membuat infra-struktur dan supra-struktur PPP di Kabupaten Tasikmalaya kokoh, bahkan menurut Asop Sopiudin, selama PPP masih menggunakan gambar Ka'bah, maka sampai kapanpun masyarakat dan konstituen akan punya harapan besar terhadap cita-cita ke-Islaman di Kabupaten Tasikmalaya.

Dakwah agama juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya menjaga citra publik, karena dalam konteks eksistensi partai, dakwah mempunyai dua fungsi, pertama sebagai media penyampai pesan, ajaran dan kebenaran agama sekaligus sebagai media sosialisasi partai, sehingga dakwah merupakan investasi politik yang mendulang citra positif partai. Dalam ruang-ruang inilah publik mengenali citra PPP sebagai partai yang merepresentasikan umat Islam. Bayangan atau imajinasi publik dan konstituen partai ketika berbicara PPP adalah, gerbong suara umat Islam, kendaraan perjuangan umat Islam dan rumah besar umat Islam. Inilah gambaran citra publik PPP di Kabupaten Tasikmalaya.

Relasi yang kedua dalam membentuk citra partai juga pengetahuan dan imajinasi publik tentang PPP adalah adanya figur atau ketokohan Ulama, baik ulama yang langsung menjadi politisi yang punya jabatan struktural di PPP maupun ulama yang tidak aktif dalam kepemimpinan partai

tetapi mempunyai dukungan secara politis kepada PPP. Keberadaan ulama yang ke-Islamannya dalam dimensi pendidikan (pesantren) maupun ke-Islaman dalam dimensi kultur, cara berpikir, termasuk eksistensi ke-kharismaan sosok ulama yang menempatkan ulama sebagai sosok penuh dengan nilai-nilai religiusitas yang harus dipatuhi, *digugu* dan ditiru, maka dalam hal ini ketika ke-kharismaan Ulama tersebut melekat unsur-unsur ataupun atribut-atribut partai, maka dengan sendirinya citra Ulama dengan segala ke-Kharismaan akan melekat sebagai citra partai yang penuh nuansa religiusitas. Maka selama ruang-ruang kultural akan nilai-nilai ke-Islaman dalam sosio-kultur masyarakat Kabupaten Tasikmalaya masih kuat, ke-kharismaan sosok Ulama masih kental dalam mempengaruhi pikiran publik, maka secara politik kekuatan PPP akan tetap mendominasi, karena secara politik simbol, PPP “mengelola” situasi kebatinan religi masyarakat Tasikmalaya, sehingga isu-isu ke-Islaman menjadi “modal” politik PPP di Kabupaten Tasikmalaya untuk mempertahankan dominasi politiknya.

Simpulan

Dari penjelasan hasil penelitian, analisis dan pembahasan di atas terlihat bahwa dari hasil analisis dan wawancara dari berbagai informan menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

Pertama, PPP di Kabupaten Tasikmalaya merupakan partai yang mapan, hal-hal yang terkait dengan masalah in-

ternal dapat diselesaikan dengan mudah dengan mengacu kepada apa yang menjadi ketentuan dalam peraturan kepartaian (AD/ART). Kedewasaan dan kemapanan tersebut merupakan bentuk nyata selama puluhan tahun PPP eksis dalam perpolitikan nasional, khususnya di Tasikmalaya. Kesulitan-kesulitan yang didapatkan PPP di tingkat nasional sama sekali tidak terjadi di lokal Tasikmalaya. Kemantapan tersebut dapat terlihat dengan solidnya pengurus, para anggota parlemen memiliki kesetiaan penuh terhadap partai termasuk untuk mengembangkan keuangan Parpol. Fungsi kepartaian relatif dilaksanakan lebih intensif dibandingkan dengan partai lain. Aktifitas-aktifitas perkaderan berjalan walaupun di luar hajatan politik seperti Pemilu dan Pemilukada. Hal ini menunjukkan hal-hal yang ideal dari yang seharusnya dilakukan oleh partai politik dilaksanakan.

Kedua, bahwa citra positif yang muncul di masyarakat dan para konstituen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dibentuk oleh pencitraan-pencitraan penting yakni PPP mendeklarasikan partainya sebagai partai kalangan Nahdhiyin, walaupun sesungguhnya tidaklah demikian. Namun strategi tersebut akhirnya berhasil menempatkan PPP sebagai pemenang dalam berbagai perhelatan politik. Hal lain yang juga diangkat sebagai isu penting di Tasikmalaya oleh PPP adalah partainya Orang Pesantren dan Partainya Para Ulama Kharismatik. Hal ini juga efektif dalam mempengaruhi konstituen di Tasikmalaya. Kemenangan UU Ruzhanul Ulum dalam

Pemilukada langsung tahun 2011 menjadi bukti kuat bahwa Orang Pesantren dapat menjadi Orang Nomor Satu di Kabupaten Tasikmalaya dengan PPP sebagai kendaraan politiknya. Pencitraan lainnya yang tidak kalah penting adalah lewat lembaga politik. Tidak kurang berbagai kebijakan penting di masa Elit PPP berkuasa sebagai Bupati dan pejabat penting lainnya telah dikeluarkan. PPP menyatu dan lekat dengan aktor-aktor politik lokal tersebut.

Ketiga, lewat upaya perbaikan sistem (dimensi kesisteman) yang baik dan perbaikan citra yang terus-menerus (reifikasi) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mewujud dari partai “gurem” menjadi Partai Penguasa di Tasikmalaya, baik penguasa

di ranah eksekutif maupun legislatif sejak Pasca Reformasi sampai sekarang. “Kukukuku” pencitraan dan penginternalisasian partai lewat birokrasi juga membentuk *image* baru sebagai partainya penguasa di Kabupaten Tasikmalaya. Gambaran ini menguatkan konsep dan teorinya Randall dan Svasand (2002) yang mengemukakan bahwa semakin intensif dan maksimalnya dimensi-dimensi institusionalisasi dijalankan oleh partai, maka partai tersebut akan semakin mantap dan populer bahkan memudahkan dalam penguasaan ranah publik dan negara. Hal tersebut jelas terbukti dalam gambaran di Kabupaten Tasikmalaya seperti yang telah dijelaskan di atas.

Daftar Pustaka

- La Palombara, Joseph dan Myron Weiner (1966) dalam bukunya *Political Parties and Political Development*, Princeton University Press.
- Moleong, L. J, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Pamungkas, Sigit, 2009, *Perihal Pemilu*, Laboratorium Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan UGM, Cet I, Yogyakarta.
- Randall, Vicky dan Lars Svasand (2002), *Party Institutionalization in New Democracies, Party Politics*, Vol.8 No.1, Sage Publication, London.
- Romli, Lili dkk, 2003, *Potret Partai Politik Pasca Orde Baru*, P2P-LIPI, Jakarta.
- Salim HS, dkk, 1999, *Tujuh Mesin Pendulang Suara : Perkenalan, Prediksi dan Harapan Pemilu 1999*, LKiS, Yogyakarta.
- Tandjung, Akbar, 2007, *The Golkar Way : Survival Partai Golkar dalam Turbulensi Politik Era Transisi*, Gramedia, Jakarta.
- Tomsa, Dirk (2008), *Party Politics and Democratization in Indonesia : Golkar in The Post- Soeharto Era*, Routledge, London and Newyork.

Sumber Lain :

PKS Jakarta Selatan, 2004, tersedia <http://www.pks-jaksel.or.id/Article128.html>, *Hasil Poling LSI : Suara Golkar dan PKS Diperkirakan Naik pada Pemilu 2004*, dilihat 21 Maret 2014.

Situs Resmi Golkar, 2014, tersedia di [http://www.Golkar.or.id/index.](http://www.Golkar.or.id/index.php?op=profil)

[http?op=profil](http://www.Golkar.or.id/index.php?op=profil), dilihat 15 Juli 2014.

Vicky Randall dan Lars Svasand (2002), *Party Institutionalization in New Democracies, Party Politics*, Vol.8 No.1, Sage Publication, London, hal 5-29, tersedia di [http://:ppq.sagepub.com](http://ppq.sagepub.com), dilihat 15 Januari 2013.